

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kredit

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi (lembaga yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana) yang sangat menunjang bagi perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta menyediakan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, salah satu fungsi bank umum adalah sebagai pengumpul dana, selain fungsi yang lain yaitu memperlancar pembayaran, menjamin keamanan dan mencipta kredit. Dalam kaitannya fungsi bank umum sebagai pemberi kredit maka bank umum dituntut untuk lebih berhati-hati dalam pemberian kreditnya, agar kredit yang diberikan tersebut dapat dikembalikan oleh debitur tepat pada saat kredit tersebut jatuh tempo.

Kredit berasal dari bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran, sedangkan kredit seperti yang telah dirumuskan pada Bab I pasal 1 dan 2 Undang-Undang pokok perbankan No. 14 Tahun 1967 disebutkan : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Pengertian seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut masih terasa cukup luas, namun dari penjelasan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut

kepada pihak lain, dengan harapan dari memberikan pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Dari proses itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah pihak serta akan mematuhi kewajibannya masing-masing. Dalam pemberian kredit terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Sebagai lembaga yang memberikan kredit, maka kebijakan kredit yang dibuat bank harus mampu memberikan pendapatan maksimum bagi bank yang didasari pada tiga hal yaitu (*American Institute of Banking, 1990:212*):

- a. Penyediaan likuiditas yang cukup dan diversifikasi resiko untuk melindungi pemegang rekening bank;
- b. Penyediaan kebutuhan kredit yang sah bagi pemegang rekening dan masyarakat;
- c. Menaati praktek-praktek pemberian pinjaman dan kredit yang sah.

Sasaran yang hendak dicapai oleh bank dalam kebijakan kreditnya antara lain mengusahakan adanya kekayaan yang sehat, mengamankan dana simpanan, dan mengusahakan keuntungan yang akan memungkinkannya secara terus-menerus memenuhi fungsi sebagai *agent development*. Dengan adanya sasaran tersebut, bank harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit yang masuk, sehingga diperlukan adanya analisis kredit yang dikenal dengan formula 4P dan 5C yaitu (*Sinungan, 1992:241*):

Adapun penjelasan mengenai Formula 4P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian peminjam, seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, pergaulan dengan masyarakat tentang diri peminjam, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian peminjam;

2. *Purpose*

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan;

3. *Prospect*

Maksudnya yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha peminjam;

4. *Payment*

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan.

Adapun penjelasan mengenai Formula 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Pemberian kredit atas dasar kepercayaan yang didasari oleh adanya keyakinan pihak bank bahwa peminjam mempunyai watak yang sama;

2. *Capacity*

Penilaian kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya;

3. *Capital*

Adalah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan calon debitur dan bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha;

4. *Collateral*

Adalah barang-barang yang langsung dapat ditunjuk dan diserahkan oleh debitur modal sebagai jaminan atas dasar kredit yang diterima oleh bank;

5. *Condition*

Kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha peminjam.

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada BPR

a. Pengaruh Tingkat Pendapatan pada Permintaan Kredit.

Teori permintaan uang menurut Keynes dibangun berdasarkan pada *trade off* antara keuntungan memegang uang lebih banyak dengan beban bunga yang diakibatkannya. Maksud dari *trade off* disini adalah jumlah bunga yang hilang akibat seseorang memegang uang serta biaya dan kesulitan yang terjadi karena memegang sedikit uang (Dornbush,R.; Fischer,S.dkk, 2004:365).

Kredit adalah penyediaan uang yang menimbulkan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikannya di waktu akan datang beserta imbalannya. Dengan pengertian ini maka faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada dasarnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan uang.

Keynes membagi permintaan uang menjadi tiga tujuan (Boediono, 1998:200) yaitu:

1. Permintaan uang untuk tujuan transaksi (*transaction motive*);
2. Permintaan uang untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*);
3. Permintaan uang untuk spekulasi (*speculation motive*).

Teori permintaan uang dari Keynes dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Md/P = m(r, y) = i(r) + k(y)$$

Dimana :

$$\frac{m}{r} < 0, \text{ dan } \frac{m}{y} > 0$$

Keterangan:

Md = Permintaan uang nominal

P = Tingkat harga umum

r = Tingkat bunga

y = Tingkat pendapatan

Berdasarkan formulasi tersebut dapat dijelaskan bahwa permintaan uang terdiri atas permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang bergantung pada perubahan tingkat bunga dan permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga yang ditentukan oleh perubahan pendapatan. Dalam analisis Keynes, perubahan pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan uang, artinya apabila pendapatan meningkat maka jumlah permintaan uang akan meningkat pula dan sebaliknya, sedangkan tingkat bunga berpengaruh secara negatif terhadap perubahan permintaan uang artinya apabila tingkat bunga naik maka permintaan uang turun dan sebaliknya.

Pendapatan terdiri dari penghasilan berupa upah, bunga, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu, misalnya satu minggu, satu bulan, satu tahun, atau jangka waktu yang lama. Menurut Mulyono Sumardi (1983:34), sumber pendapatan masyarakat berasal dari:

1. Pendapatan sektor formal, yaitu pendapatan yang telah diterima sebagai balas jasa dari sektor formal yang terdiri dari pendapatan berupa barang dan jasa;
2. Pendapatan sektor informal, yaitu pendapatan yang berasal dari usaha investasi dan keuntungan sosial;
3. Pendapatan sektor subsisten, yaitu pendapatan yang terjadi bila produksi dan konsumsi berada dalam suatu masyarakat yang kecil.

Pendapatan adalah merupakan penghasilan bersih yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari melakukan sesuatu kegiatan usaha. Penghasilan bersih yang diterima merupakan total penerimaan (TR) dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan (Sudarsono, 1982:236).

Secara umum pendapatan pribadi atau *personal income (PI)* menunjukkan semua jenis pendapatan, baik yang diperoleh karena berfungsi sebagai faktor produksi, maupun tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. *Disposable income* adalah sejumlah uang yang

dibelanjakan oleh penerima untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan keinginannya. Konsep pendapatan inilah yang digunakan masyarakat untuk :

1. Pengeluaran konsumsi termasuk pembayaran bunga pinjaman;
2. Tabungan pribadi netto.

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang atau keluarga maka akan semakin besar kredit yang diterima. Hal ini dikarenakan pihak bank beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang atau keluarga maka mereka akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai debitur atau penerima kredit dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang atau keluarga maka jumlah kredit yang diterima juga semakin kecil.

Pihak bank menilai debitur yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah tidak akan memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada jatuh tempo dan begitu juga sebaliknya. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana, namun memang demikian halnya dalam kaitannya didalam *bussines* yang murni semakin kaya seseorang maka ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit.

b. Pengaruh Pendidikan pada Permintaan Kredit

Human Capital Theory mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat harus dimulai dari produktifitas individu. Jika individu memperoleh hasil yang lebih tinggi karena pendidikan yang diperolehnya maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat. Teori ini meyakini bahwa pendidikan merupakan suatu investasi yang baik bagi individu maupun masyarakat (Ananta, 1993:50).

Dalam teori *Human Capital* (Sumarsono, 2003:50) seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui peningkatan pendidikan. Setiap peningkatan satu tahun sekolah berarti, disatu pihak peningkatan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dipihak lain, menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Disamping penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan alat-alat sekolah, tambahan uang transport dan lain-lain jumlah uang yang diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktifitas kerja. Pendidikan dan pelatihan memiliki peranan dalam pengembangan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan kesempatan kerja. Pendidikan perlu dikembangkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, sehingga kemampuan manusia harus juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pendidikan dan bentuk-bentuk pekerjaan semakin menuntut adanya standart yang tinggi yang sesuai dengan tuntutan jaman.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang akan menyebabkan lebih mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, sehingga seseorang akan dapat terserap pasar tenaga kerja dan tingkat partisipasi kerjanya juga tinggi dan berarti tingkat waktu yang digunakan untuk bekerjapun juga akan meningkat.

Pada umumnya jenis dan tingkatan pendidikan dianggap dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan peningkatan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang individu. Hal-hal yang melekat pada diri orang tersebut merupakan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Makin tinggi nilai aset makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja (Sumarsono, 2003:10). Hal ini dipertegas oleh Simanjuntak (1998:53), dengan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, nilai waktunya akan bertambah mahal. Karena orang yang waktunya relatif mahal cenderung untuk menggantikan waktu luangnya untuk bekerja. Pengaruh ini sangat nyata terutama pada kaum wanita, wanita yang berpendidikan tinggi umumnya tidak tinggal dirumah mengurus rumah tangga akan tetapi mereka masuk pada pasar kerja.

Pendidikan adalah suatu proses yang tidak bisa dirasakan dalam waktu yang bersamaan. Dibutuhkan waktu dan biaya untuk bisa mendapatkan suatu pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah penyiapan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan yang diperlukan sebagai dasar untuk dapat memperoleh kesejahteraan kerja tertentu dengan relatif mudah (Suroto, 1992:346).

Pendidikan dalam ilmu pengetahuan adalah suatu kegiatan lini dan staff yang tujuannya adalah mengembangkan pemimpin untuk memperoleh efektifitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar, hubungan antara perseorangan dalam organisasi yang lebih baik dan penyesuaian pemimpin yang ditingkatkan kepada suasana seluruh lingkungannya (Moekijat, 1999:66).

Menurut Djojohadi Kusumo (1994:214) pendidikan merupakan prasarat untuk meningkatkan martabat manusia, melalui pendidikan warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupannya secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga kebutuhannya dapat

dipenuhi tanpa harus mengajukan kredit pada BPR, Bank Umum serta lembaga keuangan lainnya.

c. Pengaruh Agunan pada Permintaan Kredit

Agunan atau jaminan kredit diartikan secara umum sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Agunan adalah identik dengan *collateral* dalam prinsip 6C dalam pemberian kredit yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya (Mulyono, 1989:5). Sesuai dengan SK Direktur Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit pasal 3 yang dimaksud agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan dapat berupa barang, proy atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Jaminan kredit menduduki posisi yang penting terutama dalam fungsinya untuk pengamanan kredit yang diberikan. Dalam hal ini dapat diibaratkan penyelesaian kredit melalui barang jaminan adalah sebagai penggunaan senjata pamungkas (untuk menyelesaikan usaha terakhir). Oleh karena itu tidaklah berlebihan para analis kredit diminta kejeliannya atau ketelitiannya dalam menganalisis barang-barang jaminan. Sasaran analisis adalah :

1. Nilai ekonomis barang jaminan;
2. Nilai yuridis barang jaminan.

Secara umum nilai ekonomis suatu barang harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan, nilai barang jaminan konstan, barang jaminan dapat dijual di pasar bebas dan tidak cepat rusak. Syarat-syarat yuridis

barang jaminan harus milik nasabah, tidak berada dalam sengketa dan ada bukti pemilikan.

Semakin tinggi nilai ekonomis suatu barang jaminan maka jumlah kredit yang diterima juga semakin besar, hal ini disebabkan karena pihak bank tidak mau mengambil resiko dari barang jaminan tersebut. Karena semakin tinggi nilai barang jaminan maka resiko yang dihadapi bank akan semakin kecil dibandingkan dengan volume atau nilai barang yang dijamin.

Nilai dari suatu barang jaminan akan sangat bervariasi dari satu benda ke benda yang lain, atau antara satu lokasi dengan lokasi yang lain maupun antara satu waktu dengan waktu yang lain. Untuk itu ada beberapa kriteria dalam penilaian barang jaminan, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perolehan (*cost of acquisition*)

Yaitu nilai atau sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh sesuatu barang sesuai dengan fungsinya.

2. Nilai Buku (*book value*)

Yaitu nilai perolehan dikurangi dengan besarnya depresiasi, depresi atas barang yang bersangkutan.

3. Nilai Ganti (*replacement cost*)

Yaitu nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh kembali barang serupa atau dapat juga disebut *reconstruction cost*.

4. Nilai Atas Dasar Penilaian Kembali (*reappraisal value*)

Yaitu nilai suatu barang yang ditetapkan kembali karena adanya proses penurunan daya beli uang yang digunakan untuk mengukur nilai barang yang bersangkutan pada waktu yang lalu.

5. Nilai Pasar (*market value*)

Yaitu nilai rata-rata dari barang serupa yang dipasarkan di pasar umum.

6. Nilai Jual (*resale value*)

Yaitu nilai yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Tinjauan hasil penelitian sebelumnya bersifat fakta dan temuan serta penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang berhubungan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit yang diterapkan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dari penelitian sebelumnya diharapkan dapat mendukung dan melengkapi karena merupakan bagian dari perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian Yunitasari (2002) dengan Judul “Variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan kredit pada BPR Artha Nirwana Genteng-Banyuwangi”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah kebutuhan modal, dan agunan terhadap permintaan kredit secara bersama maupun parsial pada tahun 2002 di PT. BPR Artha Nirwana, Banyuwangi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel pendapatan, jumlah kebutuhan modal, dan agunan memberi pengaruh positif terhadap jumlah permintaan kredit. Uji F sebagai prosedur untuk menguji hipotesis koefisien secara bersama menghasilkan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($19,884 > 2,955$) berarti pendapatan, jumlah kebutuhan modal, dan agunan secara bersama mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah permintaan kredit.

Pendapatan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi mempunyai t hitung lebih besar daripada t tabel ($3,287 > 2,056$), berarti pendapatan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan kredit. Jumlah kebutuhan modal yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi mempunyai t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,477 > 2,056$), berarti jumlah kebutuhan modal mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan kredit. Jaminan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien

regresi mempunyai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,853 \leq 2,056$), berarti jaminan tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan kredit.

Penelitian Aminullah (2002) dengan Judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan variabel yang paling kuat diantara prosedur kredit, syarat pinjaman, sistem bagi hasil, dan pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel prosedur kredit, syarat pinjaman, sistem bagi hasil dan pelayanan berpengaruh nyata terhadap pengambilan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan. Uji F sebagai prosedur untuk menguji hipotesis koefisien secara bersama menghasilkan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($35,526 > 2,68$) berarti prosedur kredit, syarat pinjaman, sistem bagi hasil, dan pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah permintaan kredit.

Variabel yang paling dominan berpengaruh nyata terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan adalah pelayanan. Hal ini terlihat dari koefisien determinasi parsial masing-masing variabel. Nilai koefisien determinasi parsial variabel pelayanan lebih besar dibandingkan dengan ketiga variabel bebas yang lain, yakni sebesar 0,820 (82%). Nilai koefisien determinasi parsial dari ketiga variabel bebas lainnya yakni variabel sistem bagi hasil sebesar 0,782 (78,2%), variabel prosedur kredit sebesar 0,692 (69,2%), dan variabel syarat pinjaman sebesar 0,443 (44,3%).

Penelitian Siregar (2006) dengan Judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara”. Penelitian Siregar (2006) tentang pengaruh variabel-variabel makro ekonomi dari pengaruh pelayanan perbankan terhadap permintaan kredit pada Bank Pemerintah

di Sumatera Utara periode Tahun 2000-2004. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) didapat bahwa faktor-faktor makro ekonomi yaitu tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah di Sumatera Utara. Faktor-faktor pelayanan perbankan yang ditinjau dari waktu pemrosesan kredit (WPK) dan keramahan pelayanan pegawai bank (KP) berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat perbedaannya seperti pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Sekarang

No	Penelitian	Metode	Variabel	Studi Kasus
1.	Ninien Inayati Aminullah (2002)	<i>Multiple linier regression methode</i>	Prosedur kredit, syarat pinjaman, sistem bagi hasil, pelayanan	Bangil-Pasuruan
2.	Duwi Yunitasari (2002)	<i>Proportional Stratified Random Sampling</i>	Pendapatan, jumlah kebutuhan modal, agunan	Banyuwangi
3.	Togi TM Siregar (2006)	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Suku bunga, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, pelayanan bank	Sumatera Utara
4.	Penelitian ini (2009)	<i>Multiple Linear Regression</i>	Pendapatan nasabah, tingkat pendidikan, agunan	Pasuruan

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang sebelumnya adalah sama-sama meneliti mengenai permintaan kredit, meskipun penelitian-penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda-beda namun hasil akhir dari penelitian tersebut adalah sama yaitu permintaan kredit.

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan nasabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit;
2. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit;
3. Agunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit.

